



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul  
Telp. (0274) 368583 Fax. ( 0274) 368311

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 618 /KPU-Kab/Btl.013-329.600/XI/2015

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Suranto  
Jabatan : Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
NIK : 19650512199105163014

telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat di KPU Kabupaten Bantul dengan kegiatan sebagai berikut :

Nama kegiatan : TOT / Sosialisasi Bagi Guru PKN se Kabupaten Bantul  
Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Oktober 2015  
Tempat : Aula Komplek Pemda II  
Peserta : Guru MGMP PKN SMA/MA/SMK se Kabupaten Bantul

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 27 November 2015



M. JOHAN KOMARA, S IP.

# PILKADA LANGSUNG SERENTAK: HARAPAN DAN TANTANGAN

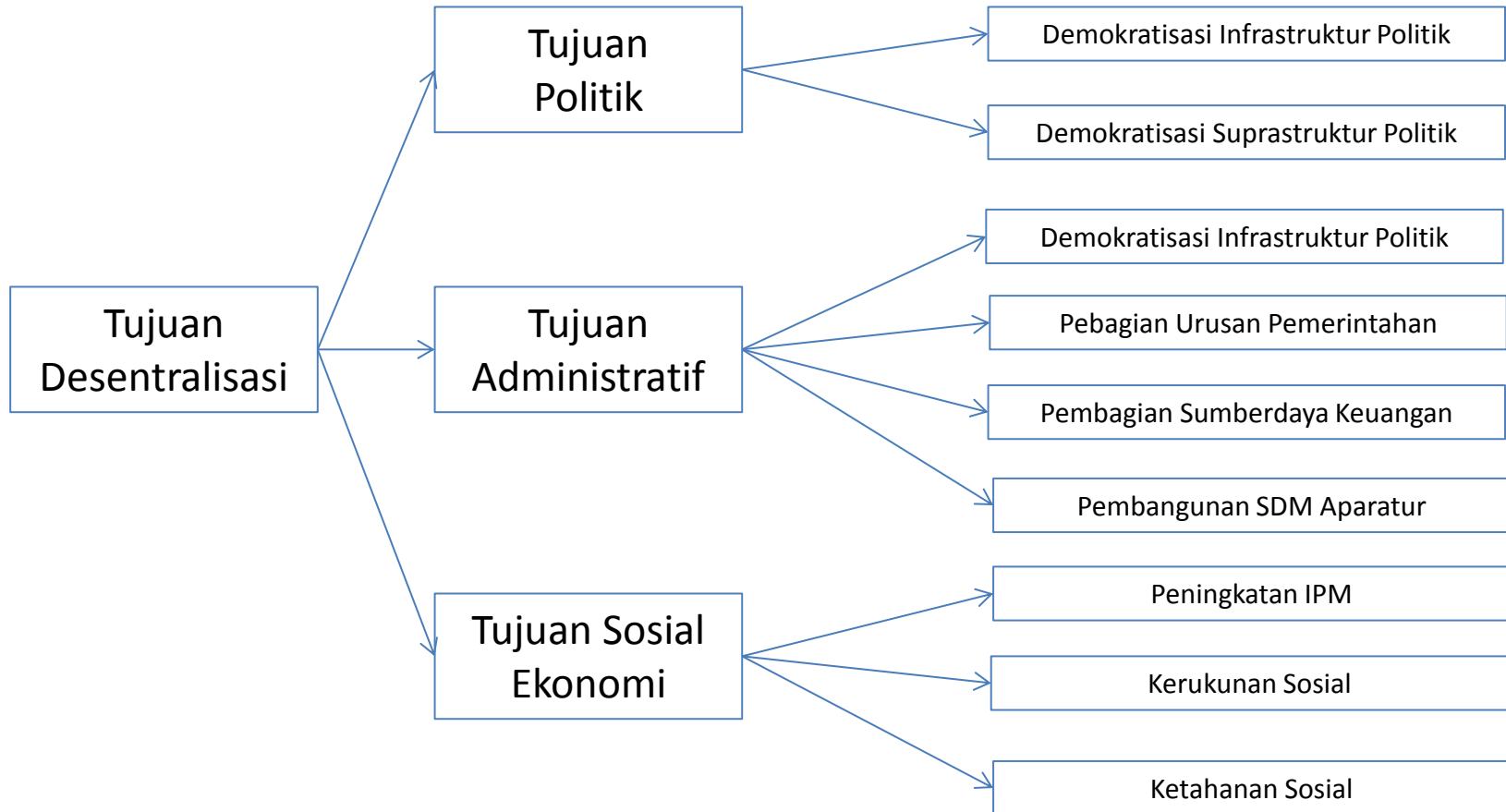
Oleh:  
Dr. Suranto  
Dosen Fisipol UMY

ToT Bagi Guru PKN se Kabupaten Bantul  
Terkait Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015  
29 Oktober 2015

# Pendahuluan

- **Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian penting dalam desentralisasi pada empat dimensi yakni desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi meskipun bukan segala-galanya.**
- **Secara umum, desentralisasi mempunyai tiga tujuan yakni:**
  - Tujuan Politik;
  - Tujuan Administrasi;
  - Tujuan Sosial Ekonomi.

# TUJUAN DESENTRALISASI



# PEMILU DEMOKRATIS

- ❖ Penyelenggaraan Pemilu **harus** memperhatikan **HAK ASASI MANUSIA** yaitu **pemenuhan hak politik** seseorang, baik **hak untuk dipilih** maupun **hak untuk memilih**.
- ❖ Pemilu harus diselenggarakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**.
- ❖ Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas **kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas**.

# TUJUAN PEMILUKADA



**Memilih pemimpin yang kapabel secara demokratis:**

- 1. Memperdalam proses demokrasi (*deepening democracy*) di Indonesia.**
- 2. Mendekatkan hubungan pemimpin dan rakyat.**

# KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA LANGSUNG

## KEUNGGULAN

1. Mencerminkan perwujudan hak dan kedaulatan rakyat
2. Partisipasi rakyat dalam pilkada
3. Memperkuat legitimasi
4. Mendekatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat
5. Pendidikan politik rakyat
6. Melembagakan proses pendalaman demokrasi.
7. Menjamin terpilihnya pemimpin yang Kapabel dan akseptabel.

## KELEMAHAN

1. Terjadinya politisasi birokrasi
2. Biaya tinggi
3. Rawan konflik
4. Belum siapnya pranata demokrasi.
5. Menimbulkan problematik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

# KONDISI EMPIRIK-AKTUAL

1

- Partai politik gagal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi.

2

- Kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai

3

- Isu netralitas KPU Prov dan KPU Kab/kota serta Panwas

4

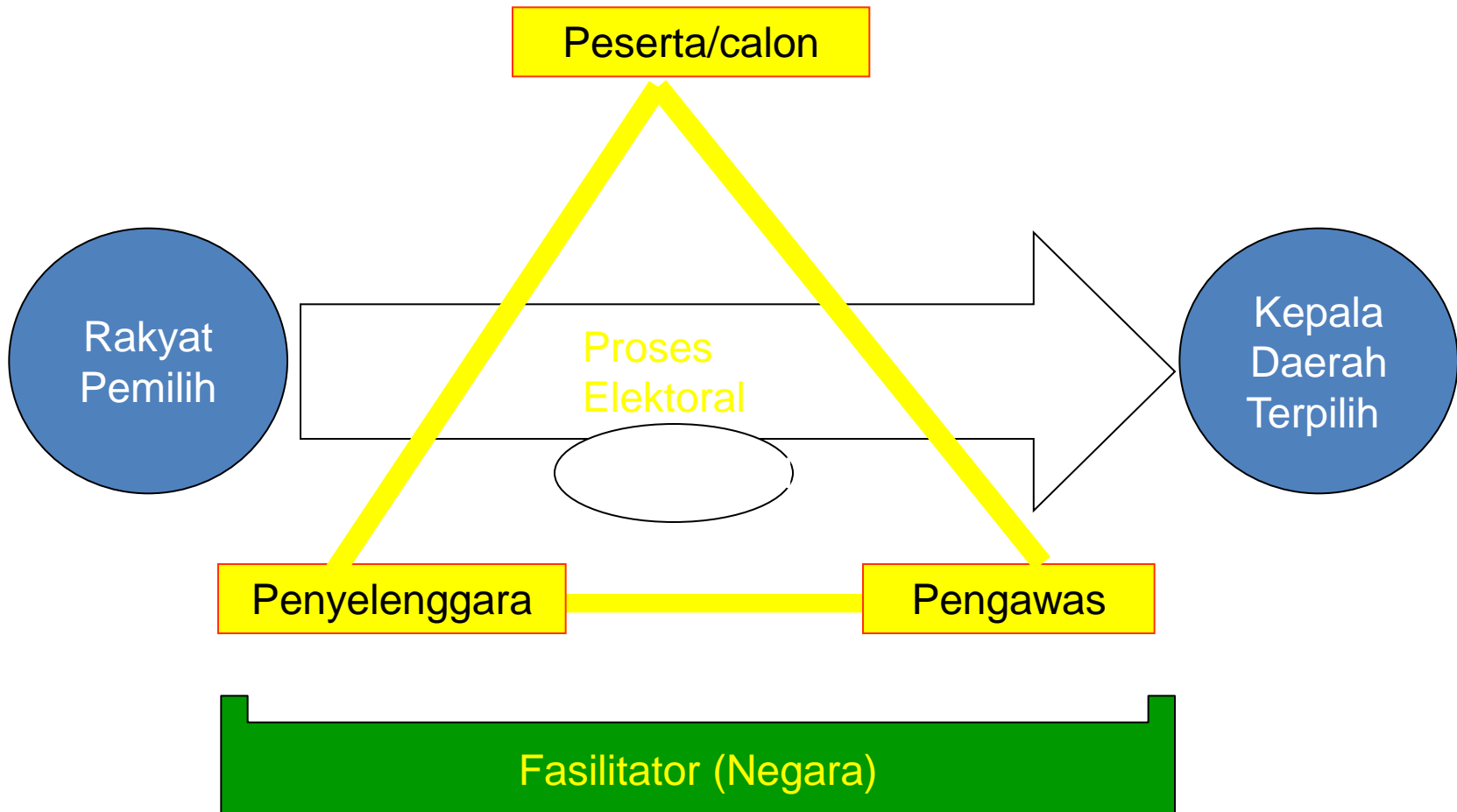
- Politisasi Birokrasi

5

- Politik uang/transaksional dan politik kekerabatan



# KERANGKA PIKIR MEWUJUDKAN PEMILUKADA BERKUALITAS



# PEMILUKADA LANGSUNG SERENTAK

## DASAR HUKUM:

- UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
- PKPU No.1/2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- PKPU No. 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wagub, Bupati &Wabup, Walikota & Wawali
- PKPU No. 3/2015 tentang Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS
- PKPU No. 4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
- PKPU No. 5/2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada
- PKPU No. 6/2015 tentang Kebutuhan Pengadaan dan Distribusi Logistik
- PKPU No. 3/2015 tentang Kampanye
- PKPU No. 4/2015 tentang Dana Kampanye
- PKPU No. 5/2015 tentang Pencalonan
- PKPU No. 6/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

# TAHAPAN PILKADAL SERENTAK

- Pemilihan Gub-Wagub, Bup-Wabup dan Walikota-Wawali Langsung dan serentak akan melalui 7 tahap, sampai 2027.
- Gel 1: 9 Desember 2015 & Semester I Tahun 2016 untuk Kepala Daerah yang habis masa jabatan pada 2015.
- Gel 2: Februari 2017: utk masa jabatan 2016-awal 2017
- Gel 3: Juni 2018: utk masa jabatan akhir 2017-awal 2019
- Gel 4: 2020 : utk masa jabatan periode 2015-2020
- Gel 5: 2022 : utk masa jabatan periode 2017-2022
- Gel 6: 2023 : utk masa jabatan periode 2018-2023
- Gel 7: 2027 Pemilu Kada Langsung Serentak seluruh Indonesia.

# ISU-ISU KRUSIAL PILKADAL SERENTAK

# PENYELENGGARA PEMILU

- Penyelenggara Pemilukadal adalah KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- Pasal 18 huruf (k) PKPU No. 3/2015: Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS.
- Pasal ini akan rawan mengingat pengalaman selama ini khususnya untuk KPPS direkrut dari tokoh masyarakat yang sudah menjadi langganan. Apabila semua personal belum berpengalaman dikhawatirkan akan potensial menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara.

# PEMUTAKHIRAN DATA

- Pasal 4 ayat 2 huruf (c) PKPU No.3/2015:

Pemilih harus memenuhi syarat:

“Berdomisili di Daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.”

Realitas empirik terutama di wilayah penyangga (suburban), banyak penduduk yang tinggal di Dapil lebih dari 6 bulan, namun belum mengurus KTP atau pindah. Sementara ada juga warga yang belum genap tinggal selama 6 bulan namun sudah memiliki KTP. Pemutakhiran harus jeli dan akurat.

Hal ini potensial menimbulkan konflik mengingat keberadaan pemilih sangat penting bagi calon.

\* TPS maksimal 800 pemilih

# PENCALONAN

- Pencalonan bisa melalui Parpol atau Gabungan Parpol atau melalui Perorangan.
- Syarat parpol/gab parpol: Memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilih dalam Pemilu legislatif terakhir. Beberapa partai yang tengah mengalami dualisme kepemimpinan terancam tak bisa menjadi kendaraan calon.
- Syarat calon perorangan: Kab/Kota dengan penduduk  $\leq 250.000$  (10%); 250 rb – 500 rb (8,5%); 500 rb-1 juta (7,5%);  $> 1$  juta (6,5%). Minimal tersebar 50% jumlah kecamatan yang ada.

# KAMPANYE

- Pasal 5 PKPU 7/2015: Kampanye dilakukan oleh (1) KPU dan (2) Calon.
- Kampanye oleh KPU meliputi: Debat publik, Penyebaran bahan kampanye kepada publik, pemasangan alat peraga dan iklan di media cetak --→ banyak KPU kesulitan anggaran.
- Kampanye oleh Pasangan Calon: Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan kegiatan lain yang tak melanggar UU -→ potensi money politics.



# PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI

- Kapasitas TPS maksimal 800 pemilih
- Pelaksanaan pemungutan suara pada hari H mulai jam 07.00-13.00
- Rekapitulasi di TPS dilakukan pada hari H pelaksanaan.
- Hasil rekap di TPS diserahkan ke PPK melalui PPS (pasal 56). Paling lambat H+1
- Rekap di Kecamatan maksimal H+7
- Rekap di kab/kota maksimal H+12

# **MEMAHAMI SOSOK KEPALA DAERAH**

- **Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan & pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.**
- **Ada Kepemimpinan organisasional dan Kepemimpinan Sosial, keduanya tergantung pada variabel :**
  - 1. Pemimpin**
  - 2. Pengikut**
  - 3. Situasi dan kondisi**
  - 4. Visi dan misi yang diembannya**

- **Kepemimpinan organisasional**
  - **Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi dengan pengikut yg menjadi bawahan yang patuh dgn berbagai ikatan norma<sup>2</sup> organisasi formal;**
  - **Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial maupun politik;**
  - **Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan fasilitas manajerial seperti :**
    - . **kewenangan, dana, personil dan logistik dsb**
- **Kepemimpinan Sosial**
  - **Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam menggerakkan bawahannya;**
  - **Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif;**
- **KDH harus mempunyai kedua bentuk kepemimpinan tsb**

✓ **Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan :**

- 1. Kapabilitas**
- 2. Akseptabilitas**
- 3. Kompatibilitas**

**ad. 1. Kapabilitas**

**Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.**

- ⦿ **Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, namun melalui proses yang panjang.**

**ad. 2. Akseptabilitas**

**Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin.**

**ad. 3. Kompatibilitas**

**Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.**

**© Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada Tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.**

⇒ **Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan**

<b>NO</b>	<b>Tingkatan Posisi Pemerintahan</b>	<b>Urutan Derajat Urgensi Aspek Kepemimpinan</b>
<b>1.</b>	<b>Presiden</b>	<b>1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas</b>
<b>2.</b>	<b>Kepala Daerah Propinsi</b>	<b>1. Kompatibilitas 2. Kapabilitas 3. Akseptabilitas</b>
<b>3.</b>	<b>Kepala Daerah K/K</b>	<b>1. Akseptabilitas 2. Kapabilitas 3. Kompatibilitas</b>
<b>4.</b>	<b>Kepala Desa</b>	<b>1. Akseptabilitas 2. Kompatibilitas 3. Kapabilitas</b>

**Rumus :**

**Pemimpin = f (Bakat, Kemampuan, kesempatan)**

**☞ Orde Baru**

- **ABRI lebih dominan**
- **Parpol (kecuali Golkar), “dimatikan”**
  - **Birokrasi hanya mempunyai bakat & kemampuan, namun tidak diberi kesempatan yg luas**

**☞ Sekarang**

- **Militer, secara bertahap mundur dari panggung politik**
- **Parpol, memperoleh peluang yang sama untuk berkembang**
  - **kaderisasi yang terlambat**
  - **birokrasi yang bimbang karena tidak mempunyai dukungan politik.**

# **DAMPAK HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH**

- **Banyak sekali faktor yang menentukan kemajuan suatu daerah, ada faktor internal yakni faktor yang berada di bawah kendali manajemen. Adapula faktor eksternal, yakni faktor yang berada diluar kendali manajemen.**
- **Berkaitan dengan Pilkada, ada tiga faktor penting yang berdampak langsung terhadap kemajuan daerah, yakni :**
  - a. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih;**
  - b. Dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di DPRD;**
  - c. “Profesionalitas” birokrasi pemerintahan daerah.**



**PETA PRAKIRAAN HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH  
(Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan  
Dukungan Politik dari Parpol Melalui DPRD)**

D  
U  
K  
U  
N  
G  
A  
N  
G  
  
P  
O  
L

TINGGI	<b>Kemajuan Daerah sangat tergantung pada Parpol pendukung</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah moderat, apabila didukung birokrasi profesional</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah akan tinggi</b>
SEDANG	<b>Tergantung Dinamika DPRD, Apabila DPRDnya <i>High Profile</i>, daerah berpeluang untuk maju</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah moderat, meskipun cenderung lambat</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah tinggi apabila DPRD justru bersifat "Low Profile"</b>
RENDAH	<b>Daerah akan cenderung mengalami kemandegan, bahkan kemunduran</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah lambat, sehingga memerlukan konsultasi pihak luar</b>	<b>Cenderung banyak konflik politik, membuat kemajuan daerah menjadi lambat</b>

RENDAH

SEDANG

TINGGI

**KAPABILITAS KEPEMIMPINAN**

# PETA PRAKIRAAN HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH (Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan “Profesionalitas” Birokrasi)

P  
R  
O  
F  
E  
S  
I  
O  
K  
R  
A  
S  
I  
T  
A  
S

TINGGI  
  
  
  
  
 SEDANG  
  
  
  
  
 RENDAH

<b>Kemajuan Daerah sangat tergantung pada ketulusan birokrasi, atau Justru terjadi biopatologi</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah moderat sampai tinggi apabila dilakukan banyak pendelegasian kew.</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah akan tinggi</b>
<b>Untuk mencapai kemajuan, diperlukan banyak supervisi dari Pem tingkat atasnya dan bantuan pihak luar</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah moderat, meskipun cenderung lambat</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah dari moderat ke arah tinggi apabila ada cetak biru yang jelas</b>
<b>Daerah akan cenderung mengalami kemandegan, bahkan kemunduran</b>	<b>Tingkat kemajuan daerah lambat, sehingga memerlukan konsultasi pihak luar</b>	<b>Cenderung menggunakan gaya otoriter untuk membuat daerah maju</b>

RENDAH

SEDANG

TINGGI

**KAPABILITAS KEPEMIMPINAN**

## CATATAN AKHIR

- **Parpol mempunyai peran penting di dalam seleksi awal bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Parpol harus ikut bertanggungjawab apabila bakal calon tersebut ternyata tidak membawa kemajuan berarti bagi daerah otonom bersangkutan.**
- **Mengingat bahwa desentralisasi pada empat dimensi (politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi) bersifat komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perubahan strategis lainnya untuk membangun daerah, antara lain membangun birokrasi yang profesional dan DPRD yang berwawasan kenegarawanan.**
- **Tidak kalah pentingnya adalah membangun masyarakat pembelajaran yang senantiasa mau belajar pada setiap langkah kegiatan untuk kemajuan masa mendatang.**